

B A B III





Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang akomodatif guna mendorong momentum pertumbuhan dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Arah kebijakan ditempuh sejalan dengan ruang yang dimiliki dengan mempertimbangkan stabilitas harga yang terjaga dengan inflasi yang menurun, stabilitas eksternal yang terkendali dengan rata-rata nilai tukar Rupiah yang menguat, dan stabilitas sistem keuangan yang terpelihara baik. Pemanfaatan ruang terbuka karena dapat mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan kredit menuju level optimum, tanpa mengganggu stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan Bank Indonesia ditempuh melalui kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan pendukung lain.



Perekonomian domestik 2019 sebagaimana disampaikan pada Bab 1 dan Bab 2, terindikasi berada di bawah lintasan optimum siklus bisnis dan siklus keuangan. Pertumbuhan ekonomi belum meningkat sehingga tercatat 5,02% akibat menurunnya kinerja ekspor, yang kemudian berdampak kepada menurunnya investasi nonbangunan dan belum meningkatnya konsumsi rumah tangga. Kondisi ini membawa kegiatan ekonomi masih bergerak di bawah kapasitas potensial. Sejalan dengan itu, pertumbuhan kredit juga menurun dipengaruhi interaksi melemahnya permintaan dan berkurangnya penawaran. Pertumbuhan kredit 2019 tercatat 6,1%, jauh menurun dibandingkan dengan capaian 2018 sebesar 11,8%. Perkembangan ini juga mengindikasikan hal yang sama, yakni siklus finansial Indonesia masih bergerak di bawah level optimumnya.

Pada saat bersamaan stabilitas perekonomian tetap terkendali, bahkan terindikasi membaik. Stabilitas harga tetap terjaga dengan tekanan inflasi yang menurun. Inflasi IHK 2019 tetap berada dalam kisaran target sehingga tercatat 2,72%, menurun dibandingkan dengan kondisi 2018 sebesar 3,13%. Stabilitas eksternal juga terkendali didorong oleh kinerja Neraca Pembayaran

Indonesia (NPI) yang mencatat surplus sejalan dengan aliran masuk modal asing yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang menurun. Aliran masuk modal asing yang meningkat dipengaruhi oleh daya saing aset keuangan domestik yang tetap tinggi dan prospek ekonomi domestik yang tetap baik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun pada akhir paruh kedua 2019. Perkembangan ini kemudian mendorong penguatan nilai tukar Rupiah yang secara rata-rata mencapai 0,76%. Selain itu, stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara, baik didukung ketahanan permodalan yang tetap tinggi di mana *capital adequacy ratio* (CAR) mencapai 23,31%, likuiditas yang mencukupi, maupun risiko kredit yang rendah dengan *non performing loans* (NPL) *gross* mencapai 2,53%.

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan sehingga dapat optimal menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan dilakukan untuk mencari keseimbangan antara mengelola stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat menopang kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Konsepsi bauran kebijakan Bank Indonesia didasari adanya hubungan erat antara stabilitas

“Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan sehingga dapat optimal menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi”

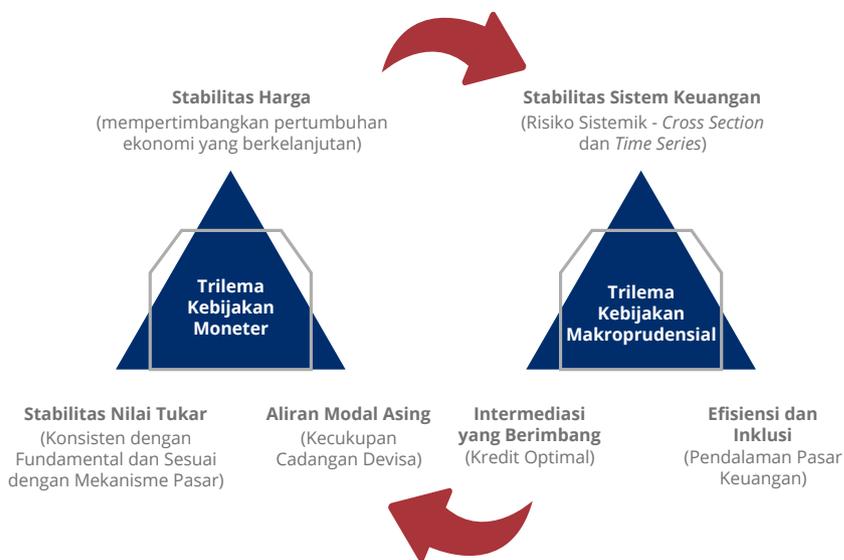
makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang bersifat saling melengkapi dan saling memperkuat.¹ Dalam kaitan ini maka satu sisi, kebijakan moneter diarahkan untuk mengoptimalkan upaya menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan aliran modal. Stabilitas harga dikelola agar konsisten dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas nilai tukar dijaga sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar, dengan aliran modal dikelola dengan baik sehingga ketahanan eksternal tetap terjaga. Sisi lain, kebijakan makroprudensial diarahkan agar stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara baik, fungsi intermediasi terjadi dengan seimbang dan sehat, serta efisiensi dan peran sektor keuangan yang inklusif dapat berkembang dengan cepat (Gambar 3.1). Untuk aspek terakhir ini, peran pendalaman pasar keuangan menjadi penting karena dapat mendorong pencapaian pasar keuangan menjadi lebih efisien dan inklusif.

Dengan mempertimbangkan dinamika dan prospek perekonomian serta konsisten dengan kerangka bauran kebijakan,

Bank Indonesia menempuh kebijakan akomodatif pada 2019. Arah kebijakan ditempuh setelah mengkaji kondisi stabilitas perekonomian yang tetap terjaga di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi dan kredit yang berada di bawah lintasan optimumnya. Kondisi ini memberikan ruang pelonggaran bagi kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, tanpa mengganggu stabilitas perekonomian. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia memperlonggar kebijakan moneter dengan menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dan Giro Wajib

Minimum (GWM). Kebijakan diperkuat dengan kebijakan nilai tukar yang sesuai dengan fundamentalnya dan Bergeraknya mekanisme pasar serta kebijakan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif juga ditempuh untuk mendorong kredit sebagai sumber pembiayaan. Di samping itu, kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi dan keuangan syariah terus diperkuat untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Gambar 3.1. Kerangka Kerja Bauran Kebijakan Bank Indonesia



Sumber: Warjiyo dan Juhro (2016)²

1 Warjiyo, Perry. (2016). Bauran Kebijakan Bank Sentral: Konsepsi Pokok dan Pengalaman Bank Indonesia. BI Institute Seri Kebanksentralan No. 25.

2 Warjiyo, P., & Juhro, S.M. (2016). Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik. PT Raja Grafindo Persada.

3.1

Kebijakan Moneter Memanfaatkan Ruang Pelonggaran

Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang akomodatif pada tahun 2019 dengan mengoptimalkan

berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, kebijakan moneter akomodatif ini tetap konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia meyakini pelonggaran kebijakan moneter tidak akan memberikan tekanan kepada stabilitas perekonomian mengingat saat bersamaan prospek inflasi cukup rendah, potensi aliran masuk modal asing cukup besar, dan stabilitas sistem keuangan tetap kuat. Kondisi ini memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter yang dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi, namun tetap menjaga stabilitas perekonomian.

Kebijakan moneter akomodatif dilakukan Bank Indonesia dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dan suku bunga kebijakan.

Pemanfaatan ruang pelonggaran kebijakan moneter ditempuh dengan mempertimbangkan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan imbal hasil investasi aset keuangan domestik yang tetap menarik. Selain itu, pelonggaran kebijakan moneter juga merupakan langkah *pre-emptive* Bank Indonesia untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi ekonomi global yang melambat. Dalam perkembangannya, strategi pilihan instrumen untuk mendukung arah

kebijakan yang akomodatif akan memperhatikan kondisi kecukupan likuiditas perbankan dan ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia pertama kali melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menggunakan instrumen kuantitas uang yakni GWM yang diturunkan 50bps menjadi 6,00% pada Juni 2019. Pilihan penurunan GWM saat itu karena mempertimbangkan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi sehingga pelonggaran kebijakan moneter melalui GWM menjadi pilihan optimum. Penurunan GWM ini menambah likuiditas perbankan sebesar Rp25,3 triliun, sebagai tambahan likuiditas perbankan untuk pembiayaan ekonomi. Bank Indonesia baru memanfaatkan ruang penurunan suku

“Kebijakan moneter akomodatif ditempuh konsisten dengan stabilitas yang terjaga serta upaya untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi”

bunga kebijakan, pada Juli 2019 dengan menurunkan BI7DRR sebesar 25bps menjadi 5,75%, setelah mempertimbangkan mulai menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global pasca penurunan FFR. Seiring makin kondusifnya kondisi pasar keuangan global dan tetap menariknya daya saing aset keuangan domestik, Bank Indonesia melanjutkan penurunan BI7DRR masing-masing 25bps di bulan Agustus, September, dan Oktober 2019 sehingga menjadi 5,00% pada akhir Desember 2019. Terakhir, Bank Indonesia kembali menggunakan instrumen GWM yang diturunkan 50bps pada November 2019 sehingga menjadi 5,5%.

Bank Indonesia juga melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan mempercepat transmisi kebijakan moneter. Pada paruh pertama 2019, kebijakan moneter difokuskan pada penguatan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas. Bank Indonesia mengimplementasikan operasi moneter pada dua sisi (*two sided monetary operation*), baik dari sisi absorpsi maupun injeksi, dengan meredistribusi likuiditas. Operasi moneter pada dua sisi tersebut dilakukan melalui lelang secara regular dan terjadual, dengan metode *variable rate tender* yang berbasis mekanisme pasar.



Selain itu, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter dengan penyeragaman instrumen operasi moneter pasar terbuka melalui implementasi *reverse repo* Surat Berharga Negara (RR SBN) untuk semua tenor mulai 7 hari sampai dengan 12 bulan. Dalam memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang, koordinasi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan perbankan terus diperkuat secara berkelanjutan baik di level teknis maupun *high level*.

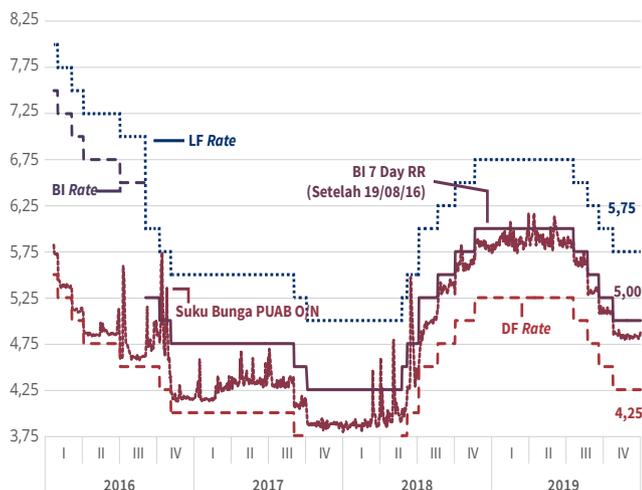
Bank Indonesia konsisten menempuh kebijakan nilai tukar untuk menjaga Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan stabilisasi Rupiah ditempuh untuk menjaga volatilitas Rupiah agar tidak berlebihan sehingga dapat mendukung ekspektasi pelaku ekonomi dan memudahkan pengambilan keputusan pelaku ekonomi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia menempuh kebijakan stabilisasi Rupiah melalui strategi *triple intervention*, baik di pasar *spot*, pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan operasi moneter guna memastikan bekerjanya mekanisme

pasar dan ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun pasar valas.

Secara umum pelonggaran kebijakan moneter dapat tertransmisi dengan baik dan dengan kecukupan likuiditas perbankan yang terjaga pada 2019.

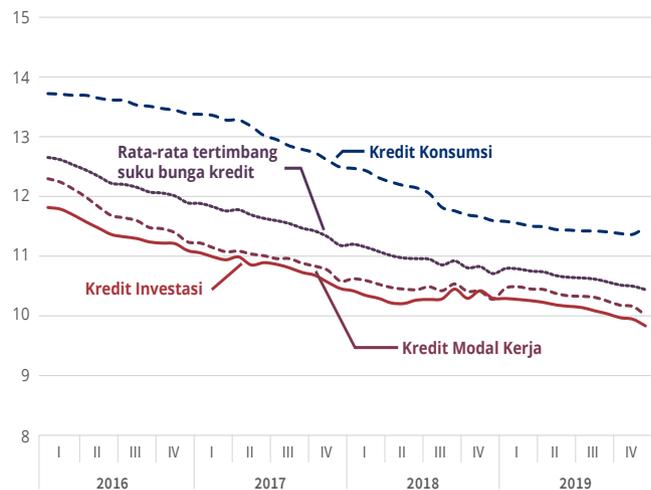
Pelonggaran likuiditas dapat menjaga likuiditas di pasar uang dan perbankan tetap memadai, seperti tercermin pada rerata harian volume PUAB yang tetap tinggi sebesar Rp19,0 triliun serta rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tetap besar yakni 20,9%. Transmisi suku bunga di pasar uang pun berjalan cukup baik, tercermin pada penurunan suku bunga PUAB tenor 1 minggu sebesar 115 bps menjadi 5,03% dan suku bunga JIBOR tenor 1 minggu sebesar 119 bps menjadi 5,05% sejak Juli 2019 (Grafik 3.1). Transmisi suku bunga perbankan berlanjut, meskipun belum optimal. Rerata tertimbang suku bunga deposito pada Desember 2019 tercatat 6,31%, turun 52 bps sejak akhir Juni 2019 sebelum BI7DRR mulai diturunkan di bulan Juli 2019. Suku bunga kredit modal kerja turun 18 bps sejak Juni 2019 menjadi 10,09% pada Desember 2019 (Grafik 3.2). Penurunan suku bunga perbankan juga diikuti oleh penurunan *yield* obligasi korporasi dan *yield* SBN 1 tahun masing-masing sebesar 72 bps dan 126 bps sejak Juli 2019.

Grafik 3.1. Suku Bunga PUAB dan BI7DRR



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.2. Suku Bunga Kredit Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

3.2

Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Dilanjutkan

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong pembiayaan ekonomi dari sektor keuangan. Arah kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi siklus keuangan Indonesia yang masih di bawah sehingga berpotensi untuk terus ditingkatkan tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia menaikkan target kisaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari 80-92% menjadi 84-94%. Kapasitas intermediasi perbankan juga diperkuat dengan memperluas komponen pendanaan dalam formula RIM, yakni dengan menambahkan komponen pinjaman yang diterima oleh bank. Selain penyempurnaan RIM, pada 2019 Bank Indonesia kembali melonggarkan

ketentuan rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) bagi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan *Down Payment* bagi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Kelonggaran diberikan sebesar 5-10% untuk mempermudah kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor. Tambahan pelonggaran yang sama juga diberikan bagi pembiayaan rumah dan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan. Kebijakan makroprudensial tersebut untuk mendorong sektor properti yang menyerap tenaga kerja cukup besar serta memiliki dampak pengganda *backward linkage* dan *forward linkage* yang besar terhadap sektor lainnya.

Penguatan kebijakan makroprudensial dilakukan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

Hal ini penting dilakukan agar upaya mendorong intermediasi perbankan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dalam perubahan ketentuan RIM, besarnya parameter disinsentif batas bawah ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan ketahanan bank. Persyaratan ini diimplementasikan dengan memperhitungkan rasio NPL dan CAR bank. Dengan demikian, bagi bank dengan tingkat risiko rendah dan ketahanan yang memadai, diharapkan dapat melakukan intermediasi yang lebih tinggi. Persyaratan prudensial juga diberlakukan untuk pinjaman bank yang akan diakui sebagai komponen RIM, antara lain melalui persyaratan tenor pinjaman yang jangka panjang. Sementara itu, pelonggaran ketentuan

“Penguatan kebijakan makroprudensial akomodatif dilakukan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian”

rasio LTV/FTV hanya dapat diimplementasikan oleh bank dengan tingkat risiko dari pemberian KPR dan KKB maupun tingkat risiko kredit secara keseluruhan, yang rendah. Selain memerhatikan aspek prudensial, kebijakan mendorong intermediasi juga diimbangi dengan kebijakan menjaga kecukupan permodalan dan likuiditas yang memadai. Pada 2019, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan *Countercyclical Capital Buffer* (CCB) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) pada level 0% dan 4%.

Secara keseluruhan, respons kebijakan yang ditempuh dapat menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan tetap mengedepankan kehati-hatian mendorong pencapaian stabilitas sistem keuangan. Sepanjang 2019, Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) berada dalam zona normal didukung kinerja institusi keuangan dan pasar keuangan yang baik, meskipun sempat bergerak meningkat (Grafik 3.3). Selain itu, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan Desember 2019 tetap tinggi yakni 23,31%, dan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah yakni 2,53% (*gross*) atau 1,18% (*net*).

Hal yang menjadi perhatian pada 2019 ialah intermediasi perbankan yang belum kuat.

Pertumbuhan kredit pada 2019 tercatat sebesar 6,1%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 11,8%. Penyaluran kredit perbankan pada 2019 tertahan, dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran. Satu sisi, permintaan kredit tidak sekuat tahun sebelumnya akibat permintaan korporasi yang masih rendah sejalan dengan kegiatan ekonomi yang belum kuat. Sisi lain, penawaran kredit tertahan sejalan dengan respons kehati-hatian perbankan dalam memberikan kredit, meskipun kapasitas perbankan dalam penyaluran kredit cukup memadai sejalan dengan kebijakan akomodatif Bank Indonesia melalui penurunan suku bunga, injeksi likuiditas, dan pelonggaran kebijakan makroprudensial.

Stabilitas sistem keuangan yang terjaga juga didukung oleh sinergi kebijakan antar otoritas di sektor keuangan, seperti melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sepanjang 2019, KSSK menyelenggarakan rapat berkala setiap triwulan dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan, pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober 2019, menyatakan stabilitas sistem keuangan tetap terkendali. Namun demikian, beberapa perkembangan eksternal dan domestik tetap dicermati seperti ketegangan hubungan dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, serta perkembangan pertumbuhan ekonomi yang belum kuat sejalan pelemahan ekonomi global. Ke depan, KSSK akan terus memperkuat koordinasi kebijakan di sektor keuangan untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan.

KSSK pada 2019 juga kembali melakukan simulasi krisis sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan teknis, sekaligus kelengkapan landasan hukum dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Simulasi krisis 2019 yang melibatkan anggota KSSK, yakni Bank Indonesia, OJK, dan LPS dilakukan secara tematik, dengan mengambil tema proses perizinan dan pendirian Bank Perantara. Selain itu, sebagai kelanjutan simulasi krisis nasional 2018, KSSK juga melakukan kegiatan *case study* 2019 yang difokuskan pada mekanisme penanganan permasalahan likuiditas bank. Selanjutnya, guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan krisis, KSSK menyelenggarakan sosialisasi kebijakan sistem keuangan dan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sektor Keuangan (PPKSK) baik pada level teknis maupun *high level* yang melibatkan perbankan, akademisi, dan masyarakat umum.



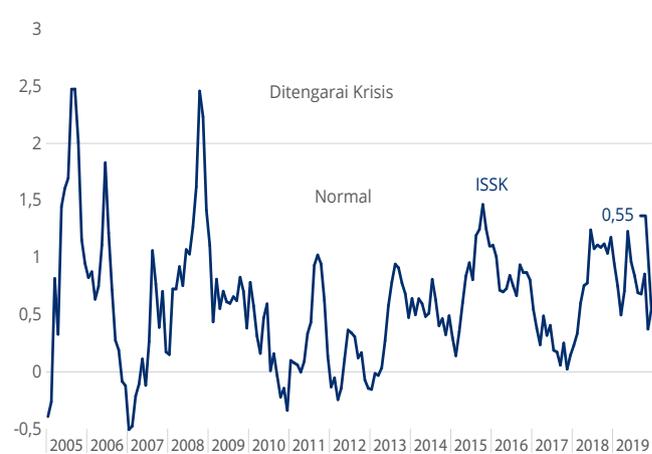
Koordinasi makroprudensial dan mikroprudensial untuk sinergi kebijakan sektor keuangan juga terus diperkuat. Fokus koordinasi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial diarahkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian perekonomian global. Dalam kaitan ini, OJK memfokuskan upaya peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan dalam pembiayaan ekonomi nasional, termasuk upaya memperluas akses investor di pasar keuangan domestik. Sementara itu, upaya bersama dalam menjaga ketahanan sistem keuangan dilakukan antara lain melalui koordinasi pemeriksaan bank, baik dalam perencanaan maupun evaluasi hasil pemeriksaan, serta koordinasi dalam pemutakhiran bank sistemik sebagaimana diamanatkan dalam UU PPKSK. Pada 2019, koordinasi bilateral dalam penanganan bank bermasalah dengan LPS juga diperkuat. Selain melalui amandemen Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dan LPS, Bank Indonesia dan LPS juga melakukan 2 (dua) kali simulasi bilateral pada 2019. Simulasi pertama dilakukan untuk pengujian penerapan ketentuan Bank Perantara,

baik yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun oleh LPS. Simulasi kedua dilakukan untuk menguji perjanjian kerjasama kedua otoritas terkait penjualan Surat Berharga Negara (SBN) oleh LPS kepada Bank Indonesia.

Sinergi kebijakan antar otoritas di sektor keuangan juga dilengkapi dengan penguatan infrastruktur data melalui integrasi pelaporan bank. Terhitung mulai 31 Desember 2019, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, sepakat mengintegrasikan pelaporan bank melalui mekanisme

satu portal yang disebut Pelaporan.id. Integrasi pelaporan tersebut dikembangkan untuk menjawab kebutuhan otoritas di sektor keuangan terhadap tersedianya mekanisme perolehan data yang cepat dan komprehensif dalam rangka pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan. Sebelum diimplementasikannya integrasi pelaporan, perbankan menyampaikan pelaporan kepada masing-masing otoritas sektor keuangan secara terpisah, yang disampaikan dalam beberapa jenis pelaporan dengan aplikasi yang juga terpisah. Melalui

Grafik 3.3. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan



Sumber: Bank Indonesia



portal Pelaporan.id, kebutuhan otoritas akan data dapat dipenuhi dengan mudah dan cepat, tidak ada redudansi, konsisten, serta berkualitas.

Ke depan, Bank Indonesia akan tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif sebagai langkah kontrasiklikal terhadap perekonomian, dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam kaitan ini, kebijakan makroprudensial pada 2020 akan diperluas guna mendukung pembiayaan pada

sektor produktif dengan kinerja baik, termasuk untuk pengembangan UMKM dan sektor prioritas, khususnya ekspor dan pariwisata. Kebijakan makroprudensial ditempuh melalui penguatan koordinasi dengan otoritas terkait, sehingga tujuan mendorong fungsi intermediasi dapat tercapai dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Keyakinan akan prospek ekonomi yang membaik, serta peningkatan kembali kepercayaan korporasi, diperkirakan mampu meningkatkan kinerja intermediasi perbankan.

3.3

Kebijakan Sistem Pembayaran untuk Pertumbuhan

Kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperkuat program elektronifikasi dan efisiensi pembayaran dalam berbagai transaksi ekonomi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mendorong perluasan dan percepatan elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area, seperti penyaluran program bantuan sosial pemerintah, transaksi pembayaran di sektor transportasi, dan pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Elektronifikasi merupakan upaya untuk mengubah cara bertransaksi di masyarakat dan diharapkan dapat memperluas akses keuangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengambil beberapa kesepakatan. Kesepakatan tersebut meliputi 12 (dua belas) program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah, yang difokuskan dalam tiga area, yaitu bantuan sosial (bansos), transaksi pemerintah daerah, dan transportasi. Program sinergi tersebut di arahkan untuk mempercepat penyaluran bansos nontunai dengan prinsip 6T (Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat harga, dan Tepat administrasi), mendorong inovasi dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sesuai prinsip aman, efisien, dan terjangkau, serta

mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Di sisi tunai, efisiensi dan jangkauan distribusi pengedaran uang terus ditingkatkan ke berbagai wilayah, termasuk ke daerah-daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

Upaya peningkatan efisiensi pembayaran dalam berbagai transaksi ekonomi terus diperkuat.

Bank Indonesia terus melanjutkan upaya efisiensi transaksi pembayaran ritel. Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah menetapkan standardisasi QR Code nasional yang dikenal dengan QRIS, yaitu *Quick Response Code Indonesian Standard*. QRIS tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan

“Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) diluncurkan untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem dan keuangan digital yang kondusif”

pembayaran ritel nontunai yang inklusif, khususnya untuk sektor usaha mikro dan kecil. Kehadirannya diharapkan dapat mengakselerasi berbagai program terkait dengan keuangan inklusif, *less cash society*, dan kolaborasi antara *fintech* dan perbankan. Bank Indonesia juga melakukan penguatan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sehingga lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal untuk mendukung efisiensi penyelesaian transaksi ritel. Upaya peningkatan efisiensi pembayaran juga didukung oleh penguatan infrastruktur pendukung berupa Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dapat memfasilitasi interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran.

Ke depan, program elektronifikasi juga akan difokuskan untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital. Di samping perluasan elektronifikasi penyaluran program sosial pemerintah, moda transportasi, dan operasi keuangan pemerintah daerah, kebijakan sistem pembayaran akan difokuskan pula untuk mendukung integrasi ekonomi

dan keuangan digital, termasuk pengembangan inklusi ekonomi dan keuangan. Hal itu dilakukan melalui penguatan instrumen dan infrastruktur publik berbasis digital, khususnya di sistem pembayaran ritel, penguatan ekosistem sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan (*Financial Market Infrastructure*, FMI), serta perluasan akseptasi nontunai dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga terus mendorong sinergi dan kolaborasi antara *fintech/e-commerce* dan UMKM melalui program *onboarding* UMKM di berbagai daerah.

Bank Indonesia mengembangkan inovasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi dan keuangan digital. Pengembangan inovasi digital akan memperkuat keterhubungan antar agen ekonomi, dari yang terkecil hingga terbesar, dari konsumen individual, UMKM, hingga korporasi besar. Integrasi ekonomi dan keuangan digital tersebut akan memperkuat efektivitas peredaran uang, transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Untuk itu, Bank Indonesia telah meluncurkan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025)* untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem dan keuangan digital yang kondusif.

Bank Indonesia juga secara konsisten melanjutkan upaya penguatan penyediaan uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bank Indonesia telah menyusun kerangka kerja Pengelolaan Uang Rupiah 2019-2025 sebagai upaya penguatan penyediaan uang layak edar sesuai denominasi secara tepat waktu dan melalui *central bank driven*. Bank Indonesia juga terus mendorong efektivitas distribusi uang Rupiah dengan memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok negeri khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T). Hal ini dilakukan dengan penguatan kelembagaan kas titipan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai di wilayah tertentu melalui kerja sama dengan perbankan. Mulai tahun 2019, penyempurnaan model bisnis kas titipan dilakukan berdasarkan

karakteristik kewilayahan dengan mengonsentrasikan layanan kas titipan di luar Pulau Jawa, mereformulasi skema bantuan finansial, serta memperkuat *governance*. Penyempurnaan model bisnis dan penguatan kelembagaan juga dilakukan untuk Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) dengan mengutamakan *governance* dan kepentingan nasional. Untuk menjaga kualitas uang yang diolah PJPUR, Bank Indonesia menerapkan aturan modal minimum, standardisasi, persyaratan kepengurusan serta mekanisme pelaporan dan pengawasan. Bank Indonesia juga terus berupaya untuk mengurangi risiko pemalsuan uang dengan meningkatkan kualitas

uang yang beredar di masyarakat dan melakukan edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut merupakan komitmen Bank Indonesia untuk mendukung kegiatan ekonomi agar terus tumbuh kuat dan merata.

Koordinasi dan kerja sama Bank Indonesia dengan otoritas dan pelaku industri terus diperkuat.

Bank Indonesia sebagai Ketua Forum Sistem Pembayaran Indonesia senantiasa melakukan koordinasi untuk mengomunikasikan rencana dan kebijakan di bidang sistem pembayaran. Bank Indonesia juga mengarahkan dan terus mendorong Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai forum

koordinasi industri sistem pembayaran untuk menjalankan fungsi sebagai *self regulatory organization* (SRO). Sementara itu, untuk menjaga kelancaran distribusi uang, Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi penyedia moda transportasi seperti PT. Kereta Api Indonesia (KAI), PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT. Silkargo Indonesia (Silkargo). Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI-AL) dalam penyediaan pengawalan dan pengamanan jalur distribusi uang dan layanan kas di seluruh wilayah NKRI.



3.4

Kebijakan Pendukung Memperkuat Efektivitas

Beberapa kebijakan pendukung juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia.

Kebijakan pendukung ini terdiri dari kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan ekonomi dan keuangan Syariah, kebijakan internasional, serta kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Berbagai kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan efektivitas dari kebijakan-kebijakan utama yang dilakukan. Dalam praktiknya, kebijakan-kebijakan ini diperkuat dengan koordinasi yang erat dengan institusi-institusi terkait.

Kebijakan pendalaman pasar keuangan terus dipercepat guna mendukung efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial. Langkah akselerasi pendalaman

pasar keuangan difokuskan pada upaya pengembangan instrumen, infrastruktur, dan kredibilitas pasar keuangan, serta koordinasi dengan otoritas terkait dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan instrumen pasar keuangan untuk mendorong peningkatan volume transaksi dan penggunaan berbagai instrumen pasar uang dan valas, termasuk *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)*, *interest rate swap (IRS)*, *overnight index swap (OIS)*, dan Surat Berharga Komersial (SBK). Bank Indonesia juga melanjutkan pengembangan infrastruktur pasar keuangan dengan menerbitkan ketentuan tentang penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi (*market operator*), antara lain *electronic*

trading platform (ETP). Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan tentang infrastruktur kliring, yaitu *central counterparty (CCP)* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over the counter (OTC)* yang akan dilengkapi dengan penguatan infrastruktur lainnya. Dalam upaya penguatan kredibilitas pasar keuangan, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan kode etik pasar (*market conduct*) untuk meningkatkan kompetensi dan integritas pelaku pasar serta mendorong persaingan usaha yang sehat antar pelaku pasar di pasar uang dan pasar valas. Bank Indonesia juga melakukan pembentukan Indonesia *overnight index average (IndONIA)* dan penguatan Jakarta *interbank offered rate (JIBOR)* yang berlaku efektif pada awal Januari 2019, sebagai bagian

“Kebijakan pendalaman pasar keuangan terus dipercepat guna mendukung efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial”

dari upaya pemantapan kredibilitas *benchmark rate* pasar uang.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan otoritas terkait lainnya melanjutkan upaya pengembangan instrumen keuangan untuk pembiayaan inovatif infrastruktur. Kebijakan mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur difokuskan pada upaya mendorong peran swasta dalam pembiayaan, memperkaya inovasi instrumen pembiayaan, serta mempercepat pembiayaan melalui program pendampingan dan fasilitas. Berbagai inovasi pembiayaan infrastruktur juga terus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan yang beragam baik dari sisi penerbit maupun sisi investor. Pengembangan inovasi pembiayaan infrastruktur diarahkan pada pengembangan 9 (sembilan) instrumen yang potensial mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya instrumen pembiayaan berbasis syariah.

Ke depan, Bank Indonesia konsisten melanjutkan upaya akselerasi pendalaman pasar keuangan. Kebijakan akselerasi pendalaman pasar keuangan tetap difokuskan pada upaya pengembangan instrumen, infrastruktur, dan kredibilitas pasar keuangan, serta koordinasi dengan

otoritas terkait dalam FK-PPPK untuk mengoptimalkan peran pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan instrumen keuangan, termasuk berkaitan dengan transaksi valas terhadap Rupiah untuk mendorong kegiatan terkait ekonomi digital. Bank Indonesia juga melanjutkan upaya penguatan struktur pasar valas yang tetap efisien, antara lain dengan penyempurnaan ketentuan *Local Currency Settlement (LCS)* untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan dengan negara mitra. Pengembangan infrastruktur pasar keuangan terus diperkuat, terutama terkait *market operator*, antara lain ETP dan CCP untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar. Kredibilitas pasar keuangan juga terus diperkuat dengan penyempurnaan ketentuan Jakarta *interbank spot dollar rate* (JISDOR) untuk memperkuat kredibilitas referensi nilai tukar pasar.

Kebijakan pendukung lain yang ditempuh ialah komitmen Bank Indonesia untuk terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah didorong melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal (*halal value chains*) dan pendalaman pasar

keuangan syariah. Implementasi mata rantai nilai halal diperkuat melalui pengembangan ekonomi pesantren, UMKM syariah sampai dengan industri khususnya makanan, *fashion*, kosmetika, pariwisata dan farmasi, serta kampanye industri halal. Pendalaman pasar keuangan syariah diakselerasi untuk memperkuat manajemen likuiditas dan pembiayaan keuangan syariah, serta pada gilirannya akan mendukung penguatan perbankan syariah nasional. Optimalisasi keuangan sosial syariah pada sektor zakat dan wakaf juga terus didorong untuk meningkatkan pembiayaan syariah yang inklusif. Selain itu, upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai referensi utama dalam ekonomi dan keuangan syariah global juga terus didorong. Rangkaian kegiatan internasional Indonesia *Sharia Economic Festival (SEF)* yang didahului oleh Festival Ekonomi Syariah (FeSyar) di tiga wilayah Indonesia yang selama ini berlangsung sukses akan secara rutin diselenggarakan setiap tahunnya sebagai *platform* bersama dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Kebijakan internasional juga terus diperkuat untuk meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Internasional Bank Indonesia difokuskan dalam bentuk penguatan



kerja sama Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI), termasuk melakukan inovasi kebijakan dalam bentuk kerja sama keuangan dengan otoritas negara lain untuk keperluan manajemen likuiditas dalam mengelola cadangan devisa, kerja sama LCS, dan kerja sama di area sistem pembayaran. Pada 2019, kerja sama LCS Bank Indonesia dengan Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand (BOT) yang semula hanya mencakup transaksi perdagangan, diperluas dengan menambah investasi langsung dan remitansi. Kerja sama tersebut untuk mendukung upaya Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Di sistem pembayaran, Bank Indonesia menjalin kerja sama sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital dengan BNM dan akan diperluas dengan sejumlah bank sentral mitra. Selain itu, Investor Relation Unit (IRU) *linkage* terus diperkuat baik di pusat, daerah, dan luar negeri dalam mendukung investasi, pariwisata, dan perdagangan. Kebijakan internasional

juga diarahkan untuk meningkatkan reputasi dan membentuk persepsi positif terhadap Indonesia dengan turut berperan aktif dalam perumusan kebijakan di lembaga-lembaga internasional.

Untuk mendukung efektivitas bauran kebijakan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk untuk pengendalian inflasi. Pada rapat koordinasi antar pimpinan lembaga dan kementerian yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada Januari dan Juli 2019, Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati berbagai langkah strategis untuk menjaga agar inflasi IHK tetap dalam kisaran sasaran $3,5 \pm 1$ % pada 2019. Langkah strategis tersebut difokuskan pada upaya untuk mengendalikan inflasi kelompok *volatile food* maksimal sebesar 5%. Kebijakan ini ditempuh melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan fokus

pada Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi.

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi juga terus diperkuat melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2019. Dalam Rakornas tersebut, terdapat tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi ke depan yang menjadi fokus pembahasan Pertama, terus melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama di luar Jawa. Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerja sama perdagangan antardaerah. Ketiga, memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani.

Koordinasi kebijakan Bank Indonesia melalui Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda)

“Untuk mendukung efektivitas bauran kebijakan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk untuk pengendalian inflasi”

juga dilakukan untuk memperkuat kinerja industri manufaktur.

Rakorpusda dengan tema “Pengembangan Industri Manufaktur untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi secara Berkelanjutan dan Inklusif” menyepakati 6 (enam) langkah strategis untuk memperkuat kinerja industri manufaktur. Rakorpusda juga menyepakati strategi pengembangan industri manufaktur yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan yang didukung keterlibatan aktif pelaku industri. Fokus pengembangan produk dimulai pada industri otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT), dan alas kaki, serta industri lainnya yang mendukung pengembangan produk-produk di industri tersebut. Pengembangan juga dilakukan dengan memastikan integrasi pembangunan antarkawasan yang sesuai dengan keterkaitan produk yang menjadi fokus, antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Selatan.

Koordinasi kebijakan lain dilakukan terkait dengan upaya memperkuat sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Rakorpusda dengan tema Strategi Akselerasi Pencapaian Target Devisa Pariwisata menyepakati enam langkah strategis untuk mendorong penerimaan devisa pariwisata 2019. Enam langkah strategis tersebut

adalah: (i) mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas; (ii) mendorong pengembangan atraksi wisata; (iii) meningkatkan kualitas amenities di daerah destinasi wisata; (iv) memperkuat promosi wisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (*length of stay*) wisatawan mancanegara; (v) mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta perbaikan dukungan data dan informasi; dan (vi) menyusun standar prosedur Manajemen Krisis Kepariwisata (MKK) dan membentuk forum MKK Daerah.

Dalam rangka pengembangan UMKM, Bank Indonesia juga melanjutkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

Program pengembangan kluster UMKM diarahkan untuk mendukung stabilitas inflasi, penurunan defisit transaksi berjalan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Salah satu strategi pengembangan UMKM tersebut ialah dengan melakukan korporatisasi UMKM dalam bentuk kluster. Melalui kluster, Bank Indonesia membentuk jaringan antar pelaku UMKM yang memiliki usaha sejenis sehingga skala ekonomi usaha lebih besar, dan dapat memfasilitasi peningkatan

kapasitas pelaku UMKM yang tergabung dalam kluster secara lebih efektif. Peningkatan kapasitas kluster dilakukan secara *end to end process*, baik pada aspek produksi, pengolahan hasil, pemasaran, hingga kelembagaan.

Bank Indonesia melanjutkan pengembangan kluster UMKM untuk pengendalian inflasi.

Pengembangan dilakukan pada beberapa fokus komoditas pangan strategis di berbagai daerah, seperti beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan sapi. Untuk mendukung penurunan defisit transaksi berjalan, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan UMKM siap ekspor, dengan fokus pada komoditas unggulan daerah berpotensi ekspor dan pendukung pariwisata antara lain kain, kerajinan, dan kopi. Kluster UMKM binaan Bank Indonesia terus diikutsertakan dalam berbagai pameran bertaraf nasional dan internasional. Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang diselenggarakan tiap tahun menunjukkan bahwa UMKM Unggulan Binaan Bank Indonesia semakin sukses, dan bahkan banyak diantaranya telah *Go-Export* dan *Go-Digital*. Ke depan, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan UMKM sebagai bagian upaya mendukung stabilitas inflasi, penurunan defisit neraca berjalan, dan pertumbuhan yang inklusif.